

IMPLEMENTASI SISTEM EVALUASI LAPORAN INTEGRASI (SIEVLAPi) DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PELAPORAN PERANGKAT DAERAH DI KOTA TANGERANG

Rani Susera¹

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Email: rani.susera@gmail.com

ABSTRACT

Government digitalization has encouraged local governments to develop integrated reporting systems to support monitoring and decision-making. The Tangerang City Government implemented Sistem Evaluasi Laporan Integrasi (SIEVLAPi), an integrated reporting system designed to manage information on physical activity documentation, financial realization, and work schedules of local government agencies. This study aims to analyze the implementation of SIEVLAPi in supporting local government reporting governance in Tangerang City. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing, while data validity was examined through source, technique, and time triangulation. The findings show that SIEVLAPi facilitates monitoring and provides more structured reporting information. However, implementation remains suboptimal due to the lack of integration with SIPD, repeated data entry, inconsistent data updates, and uneven user capacity. The study recommends system integration, stronger data quality controls, and improved user capacity to strengthen SIEVLAPi as a reporting governance instrument.

Keywords: implementation; SIEVLAPi; governance; reporting; local government agencies.

ABSTRAK

Digitalisasi pemerintahan mendorong pemerintah daerah mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi untuk mendukung monitoring dan pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Tangerang menerapkan Sistem Evaluasi Laporan Integrasi (SIEVLAPi) untuk mengintegrasikan informasi dokumentasi kegiatan fisik, realisasi keuangan, dan jadwal pekerjaan perangkat daerah. Kajian ini bertujuan menganalisis implementasi SIEVLAPi dalam mendukung tata kelola pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil kajian menunjukkan bahwa SIEVLAPi memudahkan monitoring dan membuat informasi pelaporan lebih terstruktur. Implementasinya belum optimal karena belum terintegrasi dengan SIPD, masih terdapat penginputan data berulang, pembaruan data belum konsisten, dan kapasitas pengguna belum merata. Kajian merekomendasikan integrasi sistem, penguatan pengendalian kualitas data, dan peningkatan kapasitas pengguna.

Kata kunci: implementasi; SIEVLAPi; tata kelola; pelaporan; perangkat daerah.

PENDAHULUAN

Digitalisasi pemerintahan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem kerja yang tidak hanya lebih cepat, tetapi juga mampu mengintegrasikan informasi

sebagai dasar pengendalian dan pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah, kebutuhan tersebut menjadi penting karena pelaporan perangkat daerah tidak sekadar berfungsi sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga harus mampu menggambarkan perkembangan kegiatan, penggunaan anggaran, dan pencapaian program secara tepat dan mudah ditelusuri. Arah tersebut sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 serta penguatan akuntabilitas kinerja melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Dalam praktiknya, kebutuhan tersebut tidak sederhana karena perangkat daerah memiliki karakteristik tugas dan kebutuhan informasi yang berbeda, sehingga diperlukan sistem yang mampu menyatukan proses pelaporan dalam satu mekanisme yang terintegrasi.

Pemerintah Kota Tangerang merespons kebutuhan tersebut melalui penerapan Sistem Evaluasi Laporan Integrasi (SIEVLAPi). Sistem ini dikembangkan untuk memfasilitasi proses evaluasi, pemantauan, dan integrasi laporan perangkat daerah secara lebih terstruktur. Sebelum SIEVLAPi diterapkan, proses pengendalian dan monitoring kegiatan fisik masih dilakukan secara manual, sementara pelaporan di lingkungan perangkat daerah berlangsung melalui mekanisme yang terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengendalian membutuhkan waktu relatif lama dan informasi yang tersedia belum berada dalam satu kesatuan. SIEVLAPi kemudian dikembangkan untuk menyediakan informasi yang lebih terintegrasi mengenai pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, dan jadwal pekerjaan sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara lebih cepat dan sistematis.

SIEVLAPi menyediakan tiga menu utama yang berkaitan langsung dengan proses pelaporan dan pengendalian kegiatan, yaitu dokumentasi monitoring kegiatan fisik, realisasi keuangan, dan jadwal pekerjaan. Perangkat daerah dapat mengunggah bukti pelaksanaan kegiatan, memperbarui informasi penggunaan anggaran, serta mencatat perkembangan jadwal pelaksanaan untuk dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Data yang masuk kemudian disajikan melalui *dashboard* sehingga dapat digunakan untuk memantau capaian

kegiatan dan mengidentifikasi persoalan yang memerlukan tindak lanjut. Dengan mekanisme tersebut, SIEVLAPi diarahkan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dokumen, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kegiatan dan pengelolaan informasi pelaporan perangkat daerah.

Skala penggunaan SIEVLAPi terlihat dari jumlah paket pekerjaan yang dilaporkan melalui sistem. Pada tahun 2025 terdapat 14.083 paket pekerjaan dengan total anggaran Rp3.424.970.714.856 yang terdiri atas kegiatan swakelola, pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang menjadi kategori terbesar dengan 5.985 paket, disusul kegiatan swakelola sebanyak 3.611 paket dan jasa lainnya sebanyak 2.404 paket. Besarnya jumlah kegiatan dan nilai anggaran tersebut menunjukkan bahwa SIEVLAPi memiliki cakupan yang cukup luas dalam mendukung pemantauan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Penggunaan SIEVLAPi juga mencakup 41 perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat, badan, dinas, kecamatan, dan satu Unit Pelaksana Teknis Daerah. Keragaman karakteristik perangkat daerah tersebut menyebabkan proses implementasi SIEVLAPi berlangsung dalam kondisi organisasi yang berbeda, baik dari sisi tugas, kebutuhan informasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun pola kerja. Tersedianya sistem yang sama belum serta-merta menghasilkan tingkat pemanfaatan yang sama pada setiap perangkat daerah. Implementasi sistem sangat bergantung pada sejauh mana pengguna memahami fungsi SIEVLAPi dan mengintegrasikannya ke dalam proses kerja sehari-hari.

Persoalan implementasi mulai terlihat dari penggunaan fitur-fitur utama SIEVLAPi. Pada menu dokumentasi monitoring kegiatan fisik masih ditemukan dokumen atau foto yang belum diunggah serta ketidaksesuaian antara dokumentasi dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Pada menu realisasi keuangan, data serapan anggaran belum selalu diperbarui secara berkala, sementara pada menu jadwal pekerjaan masih terdapat kegiatan yang perkembangan waktunya belum diperbarui secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi penggunaan sebagai bagian dari proses pengendalian kegiatan.

Permasalahan tersebut semakin terlihat dari masih adanya praktik penyusunan laporan secara manual sebelum data kemudian dimasukkan atau diunggah ke dalam SIEVLAPi. Pola demikian menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya menjadi sumber utama dalam proses pelaporan, melainkan pada kondisi tertentu masih berfungsi sebagai media penyimpanan dokumen. Padahal, tujuan integrasi akan lebih optimal apabila SIEVLAPi digunakan sejak proses pencatatan, pembaruan, hingga pengendalian informasi kegiatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi sistem digital tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap prosedur, dukungan organisasi, dan efektivitas pengawasan internal.

Kondisi tersebut menjadi penting dalam perspektif tata kelola pelaporan karena kualitas informasi tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana informasi tersebut dikelola dan dimanfaatkan dalam proses pemerintahan. Sistem yang memiliki fitur lengkap belum tentu menghasilkan tata kelola pelaporan yang baik apabila data tidak diperbarui secara konsisten, dokumen tidak diverifikasi, dan informasi yang tersedia belum digunakan sebagai dasar pengendalian. Apabila sistem telah terintegrasi dengan proses kerja organisasi dan didukung oleh pengguna yang memiliki kapasitas serta kepatuhan yang memadai, sistem tersebut dapat membantu mempercepat pemantauan, mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual, dan memperkuat keterhubungan antara pelaksanaan kegiatan dengan informasi yang dilaporkan.

Sejumlah studi memperlihatkan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih menghadapi persoalan dalam mengubah keberadaan teknologi menjadi manfaat tata kelola. Studi (Dewi et al., 2022) menunjukkan bahwa sistem digital dapat memberikan kemudahan dalam proses pelayanan, tetapi keberadaan sistem belum otomatis menjamin keterbukaan informasi apabila pemanfaatannya belum konsisten. Studi (Jangku et al., 2024) menemukan adanya kesenjangan antara ketersediaan fitur *e-government* dengan realisasi manfaatnya terhadap akuntabilitas publik. Sementara itu, Studi (Adelia, 2024) menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi melalui sistem informasi belum secara langsung menghasilkan transparansi karena masih dipengaruhi oleh aspek kelembagaan dan kompetensi

sumber daya manusia. Studi (Sumarti et al., 2022) juga menegaskan bahwa transparansi pengelolaan pemerintahan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan sistem, tetapi juga oleh tata kelola internal.

Kajian mengenai implementasi sistem pelaporan internal yang secara khusus mengintegrasikan informasi dokumentasi kegiatan fisik, realisasi keuangan, dan jadwal pekerjaan pada perangkat daerah masih relatif terbatas. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak membahas kualitas layanan *e-government*, kualitas aplikasi, atau transparansi informasi publik. Sementara itu, bagaimana sebuah sistem pelaporan internal diimplementasikan dalam lingkungan perangkat daerah yang memiliki karakteristik tugas berbeda, serta bagaimana sistem tersebut digunakan sebagai bagian dari proses tata kelola pelaporan, masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Kondisi inilah yang menjadi ruang penelitian dalam mengkaji SIEVLAPi di Kota Tangerang. Kajian ini dilakukan untuk memahami implementasi SIEVLAPi dalam mendukung tata kelola pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penggunaan sistem sekaligus menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam memperkuat integrasi sistem, kapasitas pengguna, kepatuhan pelaporan, dan mekanisme pengawasan internal.

KAJIAN TEORITIS

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan proses, data, dan layanan pemerintahan sehingga pelaksanaan administrasi dapat berlangsung lebih efektif dan terarah. Dalam kerangka kebijakan nasional, SPBE diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya keterpaduan dan interoperabilitas data. *E-Government* tidak sekadar berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi merupakan proses perubahan cara kerja pemerintah agar lebih efisien, terbuka, dan responsif (Indrajit, 2018). Sejalan dengan itu (Dwiyanto, 2024) menempatkan

integrasi sistem informasi sebagai bagian penting dalam mencegah duplikasi data dan meningkatkan keandalan informasi, sedangkan (Sedarmayanti, 2017) menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan juga dipengaruhi kesiapan aparatur, regulasi, dan budaya kerja. Berdasarkan pemikiran tersebut, SPBE dalam kajian ini dipahami sebagai kerangka digitalisasi pemerintahan yang menekankan integrasi sistem, keterpaduan data, dan kesiapan organisasi. Konsep tersebut digunakan untuk melihat posisi SIEVLAPi sebagai sistem pelaporan terintegrasi yang mendukung pengelolaan informasi kegiatan perangkat daerah.

Implementasi

Implementasi merupakan proses menerjemahkan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata sehingga tujuan yang dirumuskan dapat diwujudkan dalam praktik. (Solichin, 2017) memandang implementasi sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan, sedangkan (Subarsono, 2021) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor organisasi, sumber daya, karakteristik pelaksana, serta lingkungan kebijakan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga bagaimana suatu kebijakan diterima, dijalankan, dan diintegrasikan ke dalam proses kerja organisasi. Hogwood dan Gunn dalam (Solichin, 2017) juga menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya, kejelasan tujuan dan pembagian tugas, komunikasi dan koordinasi, serta kemampuan memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan sintesis tersebut, implementasi dalam kajian ini dipahami sebagai proses penerapan SIEVLAPi oleh perangkat daerah dalam menjalankan pelaporan, monitoring, dan pengendalian kegiatan. Implementasi SIEVLAPi dianalisis melalui aspek komunikasi dan koordinasi, sumber daya, pembagian tugas dan tanggung jawab, dukungan organisasi, serta kepatuhan pengguna terhadap mekanisme pelaporan.

Tata Kelola Pelaporan Perangkat Daerah

Tata kelola pelaporan perangkat daerah berkaitan dengan bagaimana proses penyampaian, pengelolaan, pemantauan, dan pemanfaatan informasi kegiatan pemerintahan dilaksanakan secara terstruktur dalam organisasi. Dalam digitalisasi pemerintahan, tata kelola

pelaporan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem informasi, tetapi juga oleh keterpaduan data, kejelasan proses, konsistensi pembaruan informasi, serta kemampuan organisasi memastikan informasi dapat digunakan untuk mendukung pengendalian dan pengambilan keputusan. Integrasi sistem sebagaimana dikemukakan (Dwiyanto, 2024) menjadi penting karena informasi yang tidak terhubung dapat menimbulkan duplikasi dan mengurangi keandalan data, sementara (Sedarmayanti, 2017) menunjukkan bahwa kesiapan aparatur dan budaya organisasi turut menentukan keberhasilan penerapan sistem digital. Berdasarkan pemikiran tersebut, tata kelola pelaporan dalam penelitian ini dipahami sebagai proses pengelolaan informasi kegiatan perangkat daerah melalui mekanisme yang terintegrasi, tertib, dan dapat ditelusuri. Dalam konteks SIEVLAPi, tata kelola pelaporan tercermin melalui keterpaduan informasi dokumentasi kegiatan fisik, realisasi keuangan, dan jadwal pekerjaan serta pemanfaatannya sebagai dasar monitoring dan pengendalian kegiatan perangkat daerah.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi Sistem Evaluasi Laporan Integrasi (SIEVLAPi) dalam mendukung tata kelola pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya dalam penggunaan SIEVLAPi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan data sekunder berupa regulasi, dokumen pelaporan, serta data penggunaan SIEVLAPi. Data dianalisis secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SIEVLAPi dalam Prespektif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Implementasi SIEVLAPi menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Tangerang untuk mengubah pola pelaporan perangkat daerah dari mekanisme yang sebelumnya dilakukan secara manual dan terpisah menuju sistem digital yang lebih terstruktur. Perubahan tersebut terlihat dari penggunaan satu *dashboard* untuk memantau dokumentasi kegiatan fisik, realisasi

keuangan, dan jadwal pekerjaan. Sistem ini memungkinkan informasi kegiatan dihimpun dalam satu mekanisme sehingga pimpinan dapat memperoleh gambaran perkembangan pelaksanaan kegiatan tanpa harus menunggu laporan manual dari masing-masing perangkat daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa SIEVLAPi telah menjalankan fungsi dasar digitalisasi pemerintahan, yaitu mempercepat arus informasi dan memudahkan proses monitoring.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan (Indrajit, 2018) bahwa *e-Government* tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi merupakan perubahan cara kerja pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi agar proses birokrasi menjadi lebih efisien dan terbuka. Dalam konteks SIEVLAPi, perubahan tersebut terlihat dari bergesernya pola pelaporan yang sebelumnya tersebar menjadi lebih terpusat dan dapat dipantau melalui sistem. Artinya, nilai utama SIEVLAPi bukan hanya terletak pada keberadaan aplikasinya, tetapi pada perubahan proses kerja yang dihasilkan ketika perangkat daerah menggunakan sistem sebagai bagian dari aktivitas pelaporan.

Dari segi integrasi, SIEVLAPi juga telah memberikan manfaat dalam menyeragamkan format dan jenis informasi yang dilaporkan. Dokumentasi kegiatan fisik, realisasi anggaran, dan jadwal pekerjaan dapat dipantau dalam satu sistem sehingga informasi yang sebelumnya tersebar menjadi lebih mudah ditelusuri. Kondisi ini sejalan dengan pemikiran (Dwiyanto, 2024) bahwa integrasi sistem informasi diperlukan untuk mengurangi duplikasi data dan meningkatkan keandalan informasi dalam pengambilan keputusan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena SIEVLAPi belum terhubung dengan SIPD. Akibatnya, perangkat daerah masih melakukan input data pada dua sistem yang berbeda sehingga manfaat integrasi belum dirasakan secara menyeluruh.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi SPBE tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi. Sistem yang berdiri sendiri masih dapat menciptakan pekerjaan ganda apabila tidak diikuti interoperabilitas dengan sistem pemerintahan lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu temuan penting dalam implementasi SIEVLAPi karena tujuan digitalisasi seharusnya bukan sekadar memindahkan pekerjaan manual ke media elektronik, tetapi menyederhanakan proses kerja secara keseluruhan. Implementasi SIEVLAPi dapat dikatakan

telah bergerak menuju prinsip SPBE, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek integrasi antar sistem.

Implementasi SIEVLAPi dalam Praktik Kerja Perangkat Daerah

Jika dilihat dari perspektif implementasi, keberhasilan SIEVLAPi sangat ditentukan oleh bagaimana perangkat daerah menerjemahkan sistem tersebut ke dalam praktik kerja sehari-hari. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem telah digunakan untuk mendukung pelaporan kegiatan fisik, realisasi keuangan, dan jadwal pekerjaan, akan tetapi tingkat konsistensi penggunaannya belum sepenuhnya sama. Masih ditemukan dokumentasi kegiatan yang belum diperbarui, data realisasi keuangan yang terlambat diinput, serta jadwal pekerjaan yang belum diperbarui secara berkala. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara sistem yang telah disediakan dengan praktik penggunaan di lapangan.

Temuan tersebut memperkuat pandangan (Solichin, 2017) bahwa implementasi merupakan proses menerjemahkan keputusan atau kebijakan ke dalam tindakan nyata. Artinya, keberadaan SIEVLAPi belum dapat dipandang sebagai keberhasilan implementasi hanya karena sistem telah tersedia dan dapat digunakan. Implementasi baru dapat dikatakan berjalan apabila perangkat daerah benar-benar menjadikan sistem sebagai bagian dari proses kerja dan menjalankan kewajiban pelaporan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Persoalan keterlambatan input dan ketidaklengkapan data menunjukkan bahwa proses internalisasi sistem ke dalam budaya kerja perangkat daerah masih berlangsung.

Aspek sumber daya juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Perbedaan kemampuan aparatur dalam menggunakan sistem menyebabkan tingkat pemanfaatan SIEVLAPi tidak sepenuhnya seragam. Perangkat daerah yang memiliki aparatur dengan kemampuan teknologi informasi lebih baik cenderung lebih mudah beradaptasi, sedangkan unit kerja dengan keterbatasan personel dan beban kerja yang tinggi menghadapi kesulitan dalam melakukan pembaruan data secara rutin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat berdiri sendiri dalam implementasi kebijakan. Pandangan (Sedarmayanti, 2017) menjadi

relevan bahwa keberhasilan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga dipengaruhi kesiapan aparatur, regulasi, dan budaya kerja organisasi.

Selain sumber daya, komunikasi dan koordinasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari implementasi SIEVLAPi. Sistem pelaporan yang melibatkan banyak perangkat daerah membutuhkan pemahaman yang sama mengenai jenis data yang harus dimasukkan, waktu pembaruan, serta tanggung jawab masing-masing pengguna. Ketika koordinasi tidak berjalan baik, sistem dapat tetap tersedia tetapi informasi yang dihasilkan tidak lengkap atau terlambat. Dalam implementasi SIEVLAPi menunjukkan bahwa keberhasilan sistem digital sangat bergantung pada kemampuan organisasi membangun aturan kerja dan koordinasi yang mendukung penggunaan sistem secara konsisten.

Persoalan utama dalam implementasi SIEVLAPi bukan lagi pada tersedia atau tidaknya teknologi, tetapi pada sejauh mana teknologi tersebut telah menjadi bagian dari tata kerja perangkat daerah. Temuan ini sejalan dengan pemikiran (Subarsono, 2021) bahwa implementasi dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana, sumber daya, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Dalam kasus SIEVLAPi, sistem telah tersedia dan memiliki fungsi yang relevan, tetapi konsistensi penggunaan masih dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, beban kerja, koordinasi, dan mekanisme pengawasan internal.

SIEVLAPi dalam Mendukung Tata Kelola Pelaporan Perangkat Daerah

Dari perspektif tata kelola pelaporan, SIEVLAPi memberikan perubahan terutama pada cara informasi kegiatan dihimpun dan digunakan untuk proses monitoring. Sebelum sistem diterapkan, pelaporan dilakukan secara manual dan menggunakan mekanisme yang terpisah. Setelah SIEVLAPi digunakan, informasi mengenai dokumentasi kegiatan fisik, realisasi keuangan, dan jadwal pekerjaan dapat disajikan dalam satu dashboard. Perubahan ini membuat proses pemantauan menjadi lebih mudah dan memberikan ruang bagi pimpinan untuk mengetahui perkembangan kegiatan secara lebih cepat. SIEVLAPi telah memberikan kontribusi terhadap terbentuknya pola pelaporan yang lebih terstruktur dan mudah ditelusuri.

Fungsi tersebut terlihat cukup kuat pada tiga menu utama SIEVLAPi. Dokumentasi monitoring kegiatan fisik memungkinkan pelaksanaan kegiatan dibuktikan melalui foto, video, atau dokumen pendukung. Menu realisasi keuangan memberikan informasi mengenai perkembangan penggunaan anggaran, sedangkan menu jadwal pekerjaan memperlihatkan kesesuaian antara rencana dan perkembangan kegiatan. Ketiga informasi tersebut sebenarnya saling melengkapi. Pelaporan fisik menunjukkan apa yang dikerjakan, pelaporan keuangan menunjukkan bagaimana sumber daya digunakan, sedangkan jadwal menunjukkan apakah pekerjaan berjalan sesuai waktu yang direncanakan. Kombinasi ketiganya memberikan dasar informasi yang lebih utuh untuk melakukan pengendalian kegiatan.

Dalam konteks tata kelola, keberadaan sistem tersebut memberikan manfaat karena informasi menjadi lebih mudah dipantau dan diverifikasi. Pimpinan tidak harus sepenuhnya bergantung pada dokumen manual yang disampaikan secara bertahap, tetapi dapat melihat perkembangan kegiatan melalui sistem. Hal ini memperkuat aspek transparansi internal karena informasi pelaksanaan kegiatan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan pengawasan. Pada saat yang sama, tanggung jawab perangkat daerah dalam memperbarui data memperkuat sisi akuntabilitas karena setiap unit memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi mengenai perkembangan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tata kelola pelaporan yang didukung SIEVLAPi masih menghadapi persoalan kualitas dan konsistensi informasi. Masih ditemukannya dokumentasi yang belum diunggah, realisasi keuangan yang belum diperbarui, dan jadwal pekerjaan yang tidak selalu diperbarui menunjukkan bahwa kualitas sistem sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan oleh pengguna. Sistem dapat menyediakan dashboard yang baik, tetapi informasi yang dihasilkan tetap memiliki keterbatasan apabila data dasarnya tidak diperbarui secara tepat waktu. Persoalan tata kelola pelaporan bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan disiplin organisasi dalam mengelola informasi.

Temuan lain yang cukup penting adalah masih adanya penyusunan laporan secara manual sebelum data dimasukkan ke dalam SIEVLAPi. Pola tersebut menunjukkan bahwa pada sebagian kondisi sistem belum menjadi sumber utama dalam proses pelaporan, tetapi masih

berfungsi sebagai media untuk mengunggah informasi yang sebelumnya telah disusun melalui mekanisme lain. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan integrasi sistem dengan praktik administrasi yang berlangsung.

Apabila dikaitkan dengan pandangan (Dwiyanto, 2024), kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi sistem harus dipahami bukan hanya sebagai penggabungan informasi dalam satu dashboard, tetapi juga sebagai integrasi proses kerja. Selama perangkat daerah masih melakukan pencatatan secara terpisah dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam sistem, integrasi yang terjadi masih berada pada tingkat penyajian informasi dan belum sepenuhnya menyentuh proses kerja. Karena itu, penguatan tata kelola pelaporan melalui SIEVLAPi membutuhkan perubahan dari sekadar digital reporting menuju proses kerja pelaporan yang benar-benar berbasis sistem.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SIEVLAPi

Implementasi SIEVLAPi didukung terutama oleh dukungan kelembagaan dan ketersediaan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan. Dukungan pemerintah daerah membuat SIEVLAPi dapat digunakan sebagai mekanisme bersama dalam memantau kegiatan, realisasi keuangan, dan jadwal pekerjaan. Sementara itu, keberadaan *dashboard* dan fitur pelaporan yang terstruktur membantu pimpinan memperoleh informasi secara lebih cepat dibandingkan mekanisme manual sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mempertahankan dan mengembangkan SIEVLAPi sebagai instrumen tata kelola pelaporan perangkat daerah.

Akan tetapi terdapat tiga hambatan utama yang perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan. *Pertama*, belum terintegrasinya SIEVLAPi dengan SIPD menyebabkan perangkat daerah melakukan input data secara berulang. Persoalan ini bukan hanya mengurangi efisiensi, tetapi juga berpotensi menimbulkan perbedaan data antar sistem. *Kedua*, kualitas dan ketepatan waktu pembaruan data belum konsisten, terlihat dari masih adanya dokumentasi kegiatan, realisasi keuangan, dan jadwal pekerjaan yang belum diperbarui secara berkala. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak lagi semata-mata berada

pada teknologi, tetapi pada disiplin dan kepatuhan pengguna. *Ketiga*, kapasitas sumber daya manusia dan dukungan personel belum merata, sehingga kemampuan perangkat daerah dalam memanfaatkan sistem masih berbeda, terutama pada unit kerja dengan keterbatasan personel dan beban kerja yang tinggi.

Temuan tersebut mengarah pada tiga prioritas kebijakan. *Pertama*, Pemerintah Kota Tangerang perlu menempatkan integrasi SIEVLAPi dengan SIPD sebagai prioritas utama, sehingga penginputan data tidak lagi dilakukan pada dua sistem dan SIEVLAPi dapat berfungsi sebagai bagian dari ekosistem data pemerintahan, bukan sebagai aplikasi tambahan. *Kedua*, perlu dibangun mekanisme pengendalian kualitas dan ketepatan waktu data, misalnya melalui penetapan batas waktu pembaruan, validasi data, serta pemantauan kepatuhan perangkat daerah secara berkala. *Ketiga*, penguatan kapasitas dan dukungan pengguna perlu diarahkan secara lebih selektif kepada perangkat daerah yang memiliki keterbatasan SDM dan beban kerja tinggi melalui pendampingan teknis dan penguatan kompetensi. Dengan tiga langkah tersebut, kebijakan pengembangan SIEVLAPi tidak berhenti pada penyempurnaan aplikasi, tetapi diarahkan pada perubahan proses kerja dan penguatan tata kelola pelaporan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Evaluasi Laporan Integrasi (SIEVLAPi) di Kota Tangerang telah memberikan kontribusi terhadap tata kelola pelaporan perangkat daerah melalui penyatuan informasi dokumentasi kegiatan fisik, realisasi keuangan, dan jadwal pekerjaan dalam satu sistem yang memudahkan monitoring dan pengendalian, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat penginputan data secara berulang akibat belum terintegrasinya SIEVLAPi dengan SIPD, pembaruan data yang belum konsisten, serta kapasitas pengguna yang belum merata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama SIEVLAPi bukan lagi pada ketersediaan teknologi, melainkan pada integrasi sistem dan perubahan proses kerja agar pemanfaatannya benar-benar menjadi bagian dari tata kelola pelaporan perangkat daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang perlu

memprioritaskan integrasi SIEVLAPi dengan SIPD, penguatan mekanisme pengendalian kualitas dan ketepatan waktu pembaruan data, serta peningkatan kapasitas pengguna melalui pendampingan yang berbasis kebutuhan. Ketiga langkah tersebut penting agar SIEVLAPi tidak berhenti sebagai media pelaporan, tetapi berkembang menjadi sumber informasi yang andal untuk monitoring, pengendalian, dan pengambilan keputusan pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Adelia Sakinah Rahmah, Y. (2024). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Utara Berbasis WEBSITE. *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi*, 5(1), 74–87. <https://doi.org/10.46576/djtechno>.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed: Edisi Keempat*.
- Dewi, H., Yuningsih, Y., Centia, S., (2022). Evaluasi E-Government dalam Pelayanan perizinan Online melalui WEBSITE HAY.U Bandung dan Aplikasi Gampil Tahun 2022 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2022). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 4(1), 46–61.
- Dwiyanto, A. (2024). *Tata Kelola Pemerintahan Adaptif: Inovasi dan Transformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Indrajit, R. E. (2018). *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. PT Elex Media Komputindo.
- Jangku, W. S., Candiasa, I. M., & Sunarya, I. M. G. (2024). Evaluasi Kualitas E-Government Menggunakan Metode E-Govqual , Importance Performance Analysis (IPA) dan Heuristic Evaluation. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 4(4), 2294–2306. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i4.1671>
- Kothari, C. R. (2012). Research Methology: An Introduction. In *Research Methodology. Methods and Techniques*.
- Kuncoro, A. (2019). *Administrasi Adaptif: Menjawab Tantangan Birokrasi Modern*. Laksbang Presindo.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosda Karya.
- Mustafa, D. (2019). *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy Edisi 6*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers.

- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama.
- Solichin, A. W. (2017). *Analisa Kebijakan Dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Subarsono. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sumarti, T., Damanhuri, D. S., Sjaf, S., Law, V., Government, V., Rosadah, R. A., Iqbal, M., Samadi, B., Government, N. I. S., Nomaini, F., Effendi, S., Bafadhal, O. M., Dwi, A., Nurhadianto, T., Sugiri, S., & Hajad, V. (2022). Transparency of Local Financial Management: Evidence from Local Governments in Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 6(1), 50–70. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5433>